

RRI Purwokerto sebagai Jembatan Informasi dan Aspirasi Masyarakat

**Sarah Imani Fatihah¹, Dewi Indah Kusumawardani², Iksanul Arifin³*

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: sarahimani268@gmail.com¹, dewiindahkw20@gmail.com², ikhsanul2004@gmail.com³

DOI: <https://doi.org/10.35878/muashir.v4i1.2255>

Article Info

Article history:

Received 04-05-2026

Revised 26-05-2026

Accepted 27-05-2026

ABSTRACT

The development of digital media has transformed the distribution and consumption of information in society, but it has also raised concerns regarding accuracy and balance in news content. In this context, public broadcasting institutions play an important role as independent information providers oriented toward the public interest. This study aims to analyze the role of Radio Republik Indonesia Purwokerto as a public media institution in accommodating and voicing the aspirations of the Banyumas community in the digital era. The research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with journalists, participatory observation during an internship program, documentation of broadcast archives, and interviews with community members featured in news reports. The findings show that Radio Republik Indonesia Purwokerto implements its public service function by delivering public-oriented information, providing participatory spaces through interactive programs, and highlighting local socio-economic issues. Editorial processes are conducted systematically through issue selection and news verification to ensure accuracy and balance. Digital transformation has expanded broadcast reach without shifting its public service mandate. This study confirms the continued relevance of public media in supporting democratic communication at the local level.

Keywords: *public broadcasting, public service media, community participation, local communication, digital transformation.*

ABSTRAK

Perkembangan media digital telah mengubah pola distribusi dan konsumsi informasi masyarakat, namun juga memunculkan persoalan terkait akurasi dan keberimbangan informasi. Dalam situasi tersebut, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting sebagai penyedia informasi yang independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Radio Republik Indonesia Purwokerto sebagai media publik dalam menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat Banyumas di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jurnalis, observasi partisipatif selama kegiatan magang, dokumentasi arsip siaran, serta wawancara dengan masyarakat yang menjadi narasumber pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radio Republik Indonesia Purwokerto melaksanakan fungsi pelayanan publik melalui penyampaian informasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembukaan ruang partisipasi melalui program interaktif, serta pengangkatan isu sosial ekonomi lokal. Proses redaksi dilakukan secara sistematis melalui penentuan isu dan verifikasi berita untuk menjaga akurasi dan keberimbangan. Transformasi digital memperluas jangkauan siaran tanpa menggeser mandat pelayanan publik. Penelitian ini menegaskan bahwa media publik tetap relevan dalam mendukung komunikasi demokratis di tingkat daerah.

Kata Kunci: media publik, pelayanan informasi, partisipasi masyarakat, komunikasi lokal, transformasi digital

**Corresponding author :*

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 40A, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Email : sarahimani268@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan media digital dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara distribusi dan konsumsi informasi masyarakat secara substansial. Era digital membuka peluang bagi publik untuk mengakses informasi secara cepat dan interaktif melalui media sosial, platform daring, dan layanan *streaming*. Namun, pertumbuhan media digital juga menghadirkan persoalan serius terkait akurasi, keberimbangan, serta rendahnya proses verifikasi terhadap konten yang beredar di ruang publik (Masduki & Muryanto, 2010). Sementara media sosial mampu mempercepat penyebaran berita, keterbatasan mekanisme verifikasi dan kriteria editorial sering kali menghasilkan informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan menyesatkan, sehingga memperlemah fungsi media sebagai pilar demokrasi.

Dalam konteks munculnya berbagai tantangan tersebut, lembaga penyiaran publik (LPP) hadir sebagai institusi media yang diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang independen, netral, serta berorientasi pada kepentingan publik. Keberadaan LPP menjadi penting di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, terutama ketika media komersial sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi maupun politik tertentu. Oleh karena itu, LPP dituntut untuk menjaga integritas jurnalistik melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan posisi tersebut, LPP tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi publik yang mampu meningkatkan literasi media dan memperkuat kesadaran demokratis masyarakat.

Public Service Broadcasting (PSB) adalah model kelembagaan media yang secara normatif menekankan independensi, akuntabilitas, keberimbangan, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat luas sebagai publik yang dilayani (Harfiah, 2020). Dalam praktiknya, PSB berperan sebagai ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan dan aspirasi antara warga negara dengan pemerintah secara rasional dan demokratik. Melalui fungsi tersebut, PSB dapat menjadi media yang

mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, sekaligus memperkuat nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, keberadaan PSB tidak hanya penting sebagai lembaga penyiaran, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung terciptanya masyarakat yang kritis, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Di Indonesia, Radio Republik Indonesia (RRI) secara hukum diformulasikan sebagai lembaga penyiaran publik yang mendapatkan mandat untuk memberikan layanan informasi, pendidikan, budaya, serta menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi (Lestari & Syarvina, 2025). Dalam praktik kelembagaan, RRI menghadapi tantangan adaptasi teknologi digital, perubahan pola konsumsi informasi, dan persaingan dengan media swasta serta media social (Ngurah Sumitha Ghanjali, 2023). Kajian empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa RRI tetap aktif menjalankan fungsinya sebagai media penyiaran publik yang dipercaya masyarakat sebagai sumber informasi yang kredibel, sekaligus terus berupaya mengembangkan strategi pelayanan publiknya di era konvergensi media (Mutiara et al., 2025).

Akan tetapi, sebagian besar studi yang telah dilakukan selama ini lebih banyak berfokus pada Radio Republik Indonesia (RRI) di wilayah tertentu, seperti Medan, Madiun, dan Denpasar. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti peran RRI dalam penyebaran informasi publik, fungsi pelayanan masyarakat, serta adaptasi lembaga penyiaran publik terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Sementara itu, penelitian empiris mengenai RRI Purwokerto sebagai media publik lokal yang memiliki peran strategis dalam menampung dan merepresentasikan aspirasi masyarakat Banyumas masih tergolong terbatas. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kebutuhan informasi yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan kajian yang lebih kontekstual dan spesifik.

Keterbatasan penelitian mengenai RRI Purwokerto menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian yang secara khusus menelaah

praktik redaksional, strategi program siaran, serta mekanisme partisipasi publik di tingkat lokal dalam konteks digitalisasi media (Masduki, 2022). Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi dan konsumsi informasi masyarakat, sehingga lembaga penyiaran publik dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa meninggalkan prinsip pelayanan publik yang menjadi landasannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana RRI Purwokerto mengelola konten siaran, membangun interaksi dengan audiens, serta memanfaatkan platform digital guna mempertahankan relevansi dan kepercayaan publik. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika media publik lokal di era transformasi digital.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang sebagai studi kasus terhadap RRI Purwokerto untuk menilai seberapa jauh fungsi ideal media publik dapat diimplementasikan dalam praktik penyiaran lokal, serta bagaimana organisasi ini melakukan adaptasi untuk mempertahankan relevansi dan kepercayaan publik di tengah dominasi media digital. Pendekatan kualitatif dipilih guna memberikan gambaran yang komprehensif berdasarkan pengalaman langsung, wawancara, dan dokumentasi program siaran. Dengan demikian, studi ini bertujuan memberikan kontribusi empiris dan teoritis pada kajian media publik, khususnya dalam ranah penyiaran lokal di Indonesia pada era transformasi digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2013) untuk menggambarkan secara mendalam peran RRI Purwokerto sebagai media publik dalam menampung dan menyuarakan aspirasi masyarakat Banyumas. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami fenomena berdasarkan kondisi empiris dan perspektif narasumber di lapangan (Bungin, 2013). Fokus penelitian diarahkan pada praktik jurnalistik di RRI Purwokerto, meliputi proses peliputan,

penentuan isu, produksi berita lokal, serta interaksi jurnalis dengan masyarakat.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan jurnalis RRI Purwokerto, Faishal, observasi partisipatif selama kegiatan magang, serta dokumentasi berupa arsip berita dan rekaman siaran. Melalui keterlibatan langsung dalam proses peliputan dan produksi berita, peneliti memperoleh pemahaman mengenai dinamika kerja jurnalistik dan pelaksanaan fungsi media publik di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Data Penelitian

Sebagai upaya memperkuat data penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan masyarakat yang aspirasinya pernah diberitakan oleh RRI Purwokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial yang terjadi di lapangan sekaligus melihat sejauh mana peran RRI Purwokerto dalam menyuarakan aspirasi masyarakat lokal.

Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi tambahan yang mendukung hasil observasi dan wawancara dengan pihak redaksi. Keterlibatan masyarakat sebagai narasumber juga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak pemberitaan dan fungsi media publik dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan ruang informasi publik. Adapun dokumentasi kegiatan wawancara ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 1. Wawancara dengan Tukang Becak

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2026

Temuan lapangan dalam penelitian ini juga diperkuat melalui wawancara langsung dengan masyarakat yang pernah menjadi narasumber dalam pemberitaan RRI Purwokerto. Salah satu narasumber yang diwawancarai adalah seorang tukang becak di Purwokerto yang sebelumnya diangkat dalam berita mengenai kondisi ekonomi masyarakat kecil di tengah perkembangan transportasi daring.

Dalam wawancara tersebut, narasumber menyampaikan bahwa keberadaan transportasi berbasis aplikasi berdampak pada menurunnya jumlah penumpang becak konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan harian yang diperoleh menjadi tidak menentu, bahkan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui pemberitaan ini, RRI Purwokerto tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menghadirkan suara masyarakat kecil yang terdampak perubahan sosial dan ekonomi di lingkungan lokal.

Wawancara ini menunjukkan bagaimana RRI Purwokerto menjalankan fungsi media publik dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung. Dokumentasi kegiatan wawancara tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Wawancara dengan Sopir Angkutan Kota
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2026

Selain wawancara dengan tukang becak, peneliti juga melakukan wawancara dengan seorang sopir angkutan kota yang pernah menjadi narasumber dalam pemberitaan RRI Purwokerto. Narasumber menyampaikan bahwa jumlah penumpang angkutan kota mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pendapatan harian yang diperoleh menjadi tidak stabil. Menurunnya minat masyarakat terhadap transportasi konvensional menunjukkan adanya perubahan pola mobilitas masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi dan kendaraan pribadi (lihat Gambar 2).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa RRI Purwokerto berperan dalam menghadirkan isu-isu sosial yang dialami masyarakat lokal, khususnya kelompok pekerja sektor informal yang terdampak perubahan sosial dan ekonomi. Melalui pemberitaan yang menampilkan pengalaman dan aspirasi masyarakat secara langsung, RRI Purwokerto menjalankan fungsi media publik sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemangku kebijakan di tingkat daerah.

Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Publik oleh RRI Purwokerto

Hasil wawancara menunjukkan bahwa RRI Purwokerto menjalankan fungsi pelayanan publik melalui penyampaian informasi, edukasi, hiburan,

serta penyaluran aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tidak berorientasi pada keuntungan komersial, melainkan lebih mengutamakan kepentingan publik dalam setiap aktivitas penyiarannya. Hal tersebut tercermin dalam pemilihan konten siaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara luas, termasuk isu-isu lokal yang berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pelayanan pemerintah daerah. Dengan demikian, RRI Purwokerto berupaya mempertahankan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat dan mampu menjadi jembatan komunikasi antara publik dengan pemangku kebijakan.

Orientasi ini membedakan RRI dari media swasta yang umumnya berbasis pasar dan iklan. Dalam praktiknya, siaran audio tetap menjadi kekuatan utama RRI, meskipun saat ini telah dikembangkan portal berita daring dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan audiens (Harfiah, 2020). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa RRI tidak hanya mempertahankan karakteristik radio konvensional, tetapi juga berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi media di era digital.

Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian mengenai lembaga penyiaran publik yang menempatkan RRI sebagai institusi penyiaran dengan mandat pelayanan informasi yang independen dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas (Masduki & Muryanto, 2010). Sebagai media publik, RRI tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang disiarkan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip independensi tersebut menjadi penting agar proses penyiaran tetap bebas dari tekanan politik maupun kepentingan ekonomi tertentu, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang objektif, berimbang, dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, RRI memiliki posisi strategis sebagai media yang menjaga kualitas ruang publik di tengah meningkatnya kompetisi media digital dan arus informasi yang semakin cepat.

Dalam konteks demokrasi lokal, lembaga penyiaran publik berfungsi sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan negara, bukan sekadar sebagai penyampai informasi satu arah (Masduki, 2022). Melalui berbagai

program siaran interaktif, dialog publik, dan pemberitaan isu-isu lokal, RRI membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pandangan terhadap kebijakan publik. Fungsi ini memperlihatkan bahwa penyiaran publik memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara secara lebih partisipatif dan demokratis. Dengan demikian, keberadaan RRI tidak hanya berkontribusi dalam penyebaran informasi, tetapi juga dalam pembentukan ruang diskusi publik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi lokal.

Pelaksanaan fungsi pelayanan publik tersebut diwujudkan melalui program *Halo RRI*, yang menjadi sarana partisipasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, dan aspirasi kepada para pemangku kebijakan. Program ini dirancang sebagai ruang komunikasi interaktif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, baik terkait pelayanan publik, pembangunan daerah, maupun isu sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Melalui mekanisme dialog langsung antara masyarakat dan narasumber dari instansi terkait, *Halo RRI* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai wadah penyampaian aspirasi publik yang lebih terbuka dan demokratis. Kehadiran program tersebut menunjukkan upaya RRI dalam membangun komunikasi dua arah yang lebih partisipatif di tengah masyarakat.

Selain itu, program *Halo RRI* memperlihatkan bahwa RRI berperan aktif dalam membuka ruang dialog publik dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses komunikasi pembangunan di tingkat daerah. Partisipasi ini memperkuat fungsi media sebagai fasilitator opini publik dan jembatan antara warga dan pemerintah (Kusumaningsih, 2024). Dengan adanya interaksi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi secara pasif, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memperoleh respons langsung dari pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, RRI berkontribusi dalam menciptakan komunikasi publik

yang lebih transparan, responsif, dan mendukung penguatan demokrasi lokal melalui keterlibatan aktif masyarakat.

Selain itu, dokumentasi lapangan memperlihatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seperti wawancara dengan tukang becak dan sopir angkutan kota di Purwokerto yang mengeluhkan menurunnya pendapatan di era transportasi daring dan perubahan sosial yang pesat. Kondisi ini mencerminkan realitas ekonomi kelompok pekerja sektor informal yang menghadapi tantangan struktural dan mobilitas sosial (Arianti et al., 2024). Situasi tersebut menjadi contoh bagaimana isu-isu lokal yang bersifat langsung dan dekat dengan kehidupan masyarakat dapat diangkat sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik media. Dalam konteks ini, RRI berperan strategis untuk menghadirkan suara kelompok rentan agar diketahui publik dan menjadi perhatian pemangku kebijakan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan fungsi pelayanan publik oleh RRI Purwokerto tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pembukaan ruang partisipasi masyarakat serta pengangkatan isu-isu sosial-ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa RRI berperan sebagai media publik yang menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam mendukung komunikasi yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Proses Penentuan Isu dan Mekanisme Verifikasi Berita di RRI Purwokerto

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penentuan isu lokal di RRI Purwokerto dilakukan melalui rapat redaksi harian yang melibatkan tim redaksi dalam menentukan arah pemberitaan. Dalam forum tersebut, para redaktur dan jurnalis mendiskusikan berbagai peristiwa serta isu yang sedang berkembang di masyarakat untuk menilai tingkat kepentingan dan relevansinya bagi publik. Pembahasan tidak hanya berfokus pada isu yang sedang viral, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, kedekatan dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta nilai informasi yang dapat memberikan manfaat bagi khalayak. Dengan demikian, proses seleksi isu

dilakukan secara kolektif dan profesional agar informasi yang disiarkan tetap sesuai dengan prinsip jurnalistik dan fungsi pelayanan publik.

Isu-isu yang dianggap memiliki nilai berita dan dampak publik kemudian diajukan dalam *agenda setting meeting* bersama pusat sebelum memasuki tahap peliputan dan produksi siaran. Mekanisme ini menegaskan bahwa proses pemberitaan tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan perencanaan yang sistematis (Efendi et al., 2023). Tahapan tersebut mencakup identifikasi isu, penentuan prioritas berita, koordinasi antarbagian, hingga penyesuaian dengan kebijakan redaksional lembaga. Melalui mekanisme ini, RRI berupaya memastikan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan memiliki akurasi, keberimbangan, dan relevansi bagi masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan pusat juga memperlihatkan adanya upaya menjaga konsistensi kualitas pemberitaan antara tingkat lokal dan nasional dalam kerangka lembaga penyiaran publik.

Dalam kajian komunikasi massa, proses agenda setting merupakan bagian penting dalam kerja redaksi, karena media berperan menentukan isu mana yang dianggap penting untuk diketahui publik. Proses seleksi dan penentuan prioritas isu ini memungkinkan media membentuk perhatian masyarakat terhadap persoalan tertentu (Al-Azhar, 2021). Dalam konteks RRI sebagai lembaga penyiaran publik, proses tersebut tidak semata-mata mempertimbangkan aspek popularitas, tetapi juga kepentingan publik dan dampak sosial bagi masyarakat lokal (Harfiah, 2020).

Selain penentuan isu, redaksi RRI Purwokerto juga menerapkan mekanisme verifikasi berita guna memastikan akurasi dan keberimbangan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Setiap informasi yang diperoleh reporter tidak langsung disiarkan, tetapi terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan penyuntingan oleh tim redaksi. Dalam tahapan tersebut, redaksi melakukan pengecekan terhadap sumber informasi, kesesuaian data, serta relevansi berita dengan kebutuhan publik. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan informasi maupun penyebaran berita yang belum terverifikasi. Dengan

demikian, proses verifikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pemberitaan agar tetap sesuai dengan prinsip jurnalistik yang bertanggung jawab.

Setiap naskah berita juga melalui tahap penyuntingan sebelum disiarkan, termasuk pengecekan terhadap aktualitas, faktualitas, serta upaya menghadirkan kedua sisi informasi (*cover both sides*). Prinsip ini menjadi bagian dari standar profesionalisme jurnalistik yang bertujuan menjaga kredibilitas media (Kristina & Setiawan, 2021). Melalui penerapan prinsip keberimbangan, RRI Purwokerto berusaha menghadirkan pemberitaan yang objektif dan tidak memihak, terutama dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan publik maupun perbedaan pandangan di masyarakat. Praktik ini menunjukkan bahwa profesionalisme redaksi tidak hanya diukur dari kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga dari ketelitian dan tanggung jawab dalam memastikan validitas isi berita sebelum dipublikasikan kepada khalayak.

Dalam kasus isu yang bersifat sensitif, proses verifikasi dilakukan lebih ketat. Redaksi melakukan konfirmasi langsung kepada sumber utama dan mencari sumber pembanding agar informasi tidak bersifat sepihak. Koordinasi dengan pimpinan redaksi juga dilakukan untuk mempertimbangkan kelayakan publikasi berita. Apabila seluruh informasi telah terkonfirmasi dan dinilai tidak merugikan pihak tertentu secara tidak proporsional, barulah berita masuk ke tahap produksi (Drajad, 2015). Praktik ini mencerminkan tanggung jawab sosial media dalam menjaga keseimbangan informasi dan independensi lembaga penyiaran publik (Masduki, 2022).

Mekanisme verifikasi yang ketat juga penting dalam konteks demokrasi lokal, di mana media berperan sebagai pengawas sosial sekaligus penyampai informasi yang dapat mempengaruhi opini publik. Dengan demikian, proses redaksi yang sistematis dan berbasis verifikasi di RRI Purwokerto menunjukkan upaya menjaga integritas pemberitaan serta memastikan informasi yang disampaikan memenuhi prinsip akurat, berimbang, dan berpihak pada kepentingan masyarakat (Rúas-Araújo, 2023).

Transformasi Digital dan Perluasan Jangkauan Siaran RRI Purwokerto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRI Purwokerto tidak lagi hanya mengandalkan siaran radio konvensional, tetapi telah melakukan transformasi digital melalui pengembangan portal berita daring, siaran streaming, serta pemanfaatan media sosial untuk memperluas jangkauan audiens, terutama generasi muda yang cenderung mengakses informasi melalui platform digital. Meskipun demikian, siaran audio tetap menjadi identitas utama RRI sebagai lembaga penyiaran publik.

Transformasi ini mencerminkan adaptasi lembaga penyiaran publik terhadap perubahan lanskap media yang semakin berbasis digital. Perubahan perilaku konsumsi media mengharuskan lembaga penyiaran untuk melakukan inovasi strategi konvergensi digital, yakni integrasi antara siaran tradisional dan platform digital seperti streaming online dan media sosial untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan audiens secara lebih luas serta memperkuat loyalitas pendengar melalui berbagai saluran distribusi digital.

Kajian mengenai konvergensi media radio di era digital menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital seperti layanan streaming dan media sosial memberikan kesempatan baru bagi media radio untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan operasionalnya dalam menghadapi kompetisi media digital yang dinamis. Strategi inovasi digital ini mencakup siaran streaming, pemanfaatan saluran daring, serta integrasi konten multimedia mampu meningkatkan aksesibilitas, partisipasi, dan loyalitas pendengar di era konvergensi media (Prabawanti & Srikandi, 2025).

Pemanfaatan media sosial oleh RRI Purwokerto juga membuka ruang interaksi yang lebih cepat dengan masyarakat. Respons publik terhadap berita atau program siaran dapat langsung terlihat melalui komentar, pesan langsung, maupun partisipasi daring yang memperluas hubungan dua arah antara penyiar dan pendengar. Interaksi ini menggambarkan bahwa media publik tidak hanya menyebarkan konten satu arah, tetapi juga mampu

mendukung dialog publik secara lebih dinamis di ranah digital, sebagaimana yang diuraikan dalam studi tentang konvergensi digital penyiaran radio di era modern (Rasheed, 2025).

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Arus informasi yang cepat di media sosial menuntut redaksi untuk bekerja lebih sigap tanpa mengorbankan prinsip verifikasi dan keberimbangan informasi. Dalam konteks ini, RRI Purwokerto tetap mempertahankan standar redaksional yang ketat seperti mekanisme verifikasi berita yang telah diterapkan pada siaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan teknis, melainkan juga memerlukan konsistensi dalam menjaga etika jurnalistik dan tanggung jawab sosial media publik (Harfiah, 2020).

Dengan demikian, transformasi digital yang dilakukan RRI Purwokerto tidak menggeser fungsi pelayanan publik yang selama ini menjadi landasan utama lembaga penyiaran publik. Sebaliknya, perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan bentuk interaksi dengan masyarakat melalui berbagai platform digital. Kehadiran portal berita daring, media sosial, serta layanan siaran berbasis internet memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan pola konsumsi media saat ini. Selain itu, penggunaan media digital juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan respons, kritik, maupun aspirasi secara lebih langsung dan interaktif dibandingkan dengan pola komunikasi konvensional sebelumnya.

Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa lembaga penyiaran publik mampu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan mandat utamanya sebagai penyedia informasi yang independen, mendidik, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis dalam distribusi informasi, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan relevansi lembaga penyiaran publik di tengah persaingan media yang semakin kompetitif. Melalui pemanfaatan teknologi digital, RRI Purwokerto tetap dapat menjalankan fungsi edukasi, informasi, hiburan, serta pelayanan publik secara lebih luas

dan efektif. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi strategi penting bagi RRI untuk menjaga keberlanjutan perannya sebagai media publik yang terpercaya dan tetap relevan di era digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa RRI Purwokerto telah melaksanakan fungsi pelayanan publik secara konsisten melalui penyampaian informasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, pembukaan ruang partisipasi publik, serta pengangkatan isu-isu lokal yang relevan dengan kehidupan warga. Program interaktif seperti Halo RRI memperlihatkan peran RRI sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Proses redaksi yang sistematis, mulai dari penentuan isu hingga verifikasi berita, juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip akurasi, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial sebagai lembaga penyiaran publik.

Selain itu, transformasi digital yang dilakukan melalui pengembangan platform daring dan media sosial menunjukkan upaya adaptasi terhadap perubahan lanskap media tanpa meninggalkan mandat pelayanan publik. Digitalisasi justru memperluas jangkauan siaran dan memperkuat interaksi dengan masyarakat. Dengan demikian, RRI Purwokerto tetap relevan sebagai sarana aspirasi masyarakat lokal serta sebagai institusi media publik yang mendukung komunikasi demokratis di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Al-Azhar, H. K. (2021). Identifikasi Agenda Setting dalam Produksi Berita. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 6(2).
- Arianti, P., Alpino, M. O. & Syafril, R. (2024). LPP RRI Padang sebagai media komunikasi massa dalam menyampaikan informasi publik. *Journal of Research and Publication Innovation*, 2(2), 1609–1614.

- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Kencana Prenada Media Group.
- Drajad, A. A. E. (2015). Verifikasi Pemberitaan Media Online. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Informasi*.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T. & Kuswananda, E. (2023). Teori Agenda Setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- Harfiah, Y. (2020). Peran media online terhadap kinerja lembaga penyiaran publik di era konvergensi media (Studi Kasus: LPP RRI Madiun). *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 144–161. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v7i2.796>
- Kristina, K. & Setiawan, B. (2021). Disiplin Verifikasi dalam Jurnalisme Media Online (Studi Kasus: detikcom). *IPTEKOM Journal*.
- Kusumaningsih, T. (2024). Partisipasi masyarakat melalui program radio lokal: Studi kasus RRI Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Publik*, 5(1), 32–45.
- Lestari, A. & Syarvina, W. (2025). Peranan lembaga penyiaran publik RRI Medan dalam menghadapi persaingan informasi pada era digital. *Epsilon Journal of Management*, 2(2), 51–60. <https://doi.org/10.62951/epsilon.v2i2.51>
- Masduki, M. (2022). *Public service broadcasting model in Indonesian transitional democracy*. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(1), 1–20.
- Masduki, M. & Muryanto, B. (2010). Jurnalisme publik pada media penyiaran publik. *Jurnal Komunikasi*, 1(2), 147–154.
- Mutiara, I. P., Agustono, B. & Pujiati, P. (2025). *Institutional transformation and digital adaptation of Radio Republik Indonesia (RRI) Medan as a Public Broadcasting Institution (1998-2014)*. *Journal of Mathematics Instruction Social Research and Opinion*, 4(4), 1615–1632. <https://doi.org/10.58421/misro.v4i4.962>
- Ngurah Sumitha Ghanjali, A. A. A. N. (2023). Strategi pelayanan lembaga penyiaran publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Denpasar.

- Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 104–109.
<https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.104-109>
- Prabawanti, I. A. B. & Srikandi, M. B. (2025). Radio dalam Ekosistem Digital: Tinjauan Literatur atas Strategi Konvergensi Media di Lembaga Penyiaran Tradisional. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*, 5(2), 155–166. <https://doi.org/10.29313/jrjmd.v5i2.8760>
- Rasheed, B. (2025). *Media Convergence of Radio*. (unpublished research article).
- Rúas-Araújo, J. (2023). *Disinformation and Verification in a Digital Society*. *Humanities*, 13(4), 81–97.
- Sugiyono, S. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.